

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **2.1. *Review Hasil Penelitian Terdahulu***

Beberapa penelitian sebelumnya dilakukan oleh Eka Arianty Arfah tahun 2011 mengenai Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan implikasinya pada kinerja keuangan (studi kasus pada rumah sakit pemerintah dan swasta di kota Bandung). Alat analisis statistik menggunakan regresi berganda, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif pengendalian internal menerapkan pada pencegahan penipuan pengadaan yang baik dan implikasinya terhadap kinerja keuangan. Artinya kinerja keuangan dipengaruhi oleh pengendalian internal menerapkan pencegahan penipuan yang baik, terdapat pengaruh penerapan lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan baik secara parsial maupun simultan terhadap pencegahan fraud pengadaan, kinerja keuangan kemudian terdapat pengaruh positif pada pencegahan fraud pengadaan barang terhadap kinerja keuangan. dan mempengaruhi residu dengan faktor lainnya tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Salah satu penelitian lainnya dilakukan oleh Hermiyetti tahun 2010 mengenai pengaruh penerapan pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dengan hasil penelitian terdapat pengaruh signifikan pada penerapan lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan baik secara parsial maupun terdapat pengaruh signifikan pada penerapan lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan baik secara parsial maupun simultan terhadap pencegahan fraud pengadaan barang, Penelitian survei ini menggunakan 23 responden yang meliputi para direktur di beberapa rumah sakit umum dan

swasta di Kota Bandung. Data diperoleh dengan menggunakan kuisioner. Analisis data menggunakan Path Analysis. Hasil dari penelitian ini antara lain bahwa terdapat dampak dari pengendalian internal dalam pencegahan penyimpangan dalam proses pelelangan. Artinya bahwa risiko penyimpangan dalam proses pelelangan dapat ditekan dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik dan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak secara langsung terkait dengan model penelitian ini. dalam variable kegiatan pengendalian memiliki skor/nilai yang rendah. Oleh karena itu disarankan kepada rumah sakit pemerintah dan swasta untuk memaksimalkan kegiatan pengendalian karena mempunyai peranan yang penting dalam mencegah fraud pengadaan barang serta disarankan kepada rumah sakit pemerintah dan swasta agar pemberdayaan SDM dilakukan dengan baik dan tepat sasaran. Ketiga, kepada seluruh komponen yang ada di rumah sakit dapat memahami tugas dan wewenang masing-masing, sehingga tugas dan tanggungjawabnya dapat dijalankan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, dan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, seperti merasa dimata-matai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Penelitian lainnya Rinie Arifianti, Budi Santoso, Lilik Handajani tahun 2015 mengenai Perspektif Triangle Fraud Theory dalam Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Provinsi NTB. Pengujian dilakukan pada 79 responden yang mewakili 32 persen populasi, Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah nonprobability yaitu purposive sampling yang merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan suatu pertimbangan/kriteria tertentu sesuai dengan yang dikehendaki peneliti, Kelompok responden adalah pokja ULP/ pejabat pengadaan pada Pemerintah Provinsi NTB dengan menggunakan analisis model struktural. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik pokja ULP/ pejabat pengadaan dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap Fraud Pengadaan barang/jasa, namun tidak dipengaruhi oleh kesesuaian kompensasi, Karakteristik pokja ULP/ pejabat pengadaan dan sistem pengendalian intern memiliki pengaruh negatif terhadap fraud pengadaan barang/ jasa. Hal ini berarti

semakin berkualitas karakteristik pokja ULP/ pejabat pengadaan dan penerapan sistem pengendalian intern akan mengurangi terjadinya Fraud pengadaan barang/ jasa. Implikasi penelitian ini mengarah pada peningkatan integritas dan kompetensi pokja ULP/ pejabat pengadaan dan sistem pengendalian intern sebagai bagian terpenting pencegahan fraud pengadaan barang/ jasa. Tantangan dalam proses pengadaan barang/ jasa adalah perumusan kebijakan yang bersinergi dengan regulasi penunjang lainnya dan peningkatan integritas dan kompetensi secara kuantitas maupun kualitas untuk perbaikan kinerja pengadaan barang/ jasa pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan Fraud Pengadaan barang/ jasa dipengaruhi karakteristik pokja ULP/ pejabat pengadaan dan sistem pengendalian intern, namun tidak dipengaruhi oleh kesesuaian kompensasi.integritas dan kompetensi pokja ULP/ pejabat pengadaan dan implementasi sistem pengendalian intern yang baikberimplikasi positif untuk menekan terjadinya fraud pengadaan barang/ jasa.

Penelitian lainnya oleh Gita Putri Agustina tahun 2016 mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian internpemerintah. Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah pegawai pengelola keuangan pada 30 SKPD Kota Surabaya.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan pada sampel yang di ambil dengan tujuan untuk generalisasi pada populasi dimana suatu sampel diambil.Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisi regresi linier berganda dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwalingkungan pengendalian berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah, penilaian risiko tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah, aktivitas pengendalian

berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah, informasi dan komunikasi berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah serta pemantauan tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah pada SKPD kota Surabaya. dengan hasil Penelitian menunjukkan bahwa integritas dan kompetensi pokja ULP/ pejabat pengadaan dan implementasi sistem pengendalian intern yang baik akan berimplikasi positif untuk menekan terjadinya fraud pengadaan barang/jasa.

Penelitian lainnya oleh Marlina, Indah Lia Puspita, dan Eka Sariningsih tahun 2012 mengenai Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Resiko Terjadinya Kecurangan (Fraud) Dalam Pengadaan Obat-Obatan Di Instalasi Farmasi Dan Distribusi Obat-Obatan Kepada Pasien dengan hasil penelitian Sistem Pengendalian Intern Instalasi Farmasi dapat disimpulkan bahwa penerapan SPI belum memenuhi beberapa komponen pengendalian intern sehingga dapat dikatakan bahwa secara teori SPI Bagian Instalasi Farmasi RSPBA belum dapat dikatakan mampu mencegah terjadinya peluang dan kesempatan baik sengaja maupun tidak disengaja terjadinya sebuah kecurangan (fraud) berupa kesalahan dalam pencatatan dan penyelewengan persediaan (korupsi).

Penelitian lainnya berdasarkan jurnal internasional dilakukan oleh Kalubanga Matthew, Kakwezi Patrick, & Kayiise Denise tahun 2013 mengenai “The effects of fraudulent procurement practices on public procurement performance” yang diartikan kurang lebih sebagai berikut “Efek dari praktek pengadaan barang palsu pada kinerja pengadaan barang publik” dan didapatkan hasil sebagaimana yaitu Ada peningkatan keprihatinan atas efek dari korupsi dan / atau penipuan pada administrasi kinerja di banyak negara di dunia. Di negara berkembang dan negara kurang berkembang keburukan korupsi dan penipuan semakin merajalela, Meskipun pengadaan publik khususnya di Uganda telah mengalami reformasi diarahkan pada transformasi proses pengadaan publik, penipuan dan kejahatan korupsi sosial telah membuat keadaan semakin memperburuk. pengadaan penipuan dan

korupsi praktek yang lebih jelas. Namun, strategi untuk mengekang kejahatan ini telah efektif untuk besar sejauh mana, karena fakta bahwa efek dari penipuan dan korupsi pada kinerja pengadaan publik sulit untuk dilakukan pembuktian. Makalah ini menyediakan link secara teoritis didukung yang mencoba untuk menjelaskan hubungan antara praktik pengadaan penipuan dan pengadaan publik kinerja. Seluruh elemen bertanggung jawab atas kegagalan yang mungkin disebabkan oleh masalah kualitas yang berkaitan dengan kegiatan penipuan internal, eksternal atau keduanya adopsi sistem pengadaan e-government diharapkan untuk dapat mengurangi interaksi manusia dalam pengadaan siklus dan kontak pribadi antara pejabat pengadaan dan pemasok, peluang untuk penyuaipan dan penipuan menurun atau dihilangkan. Ini akan meningkatkan integritas proses dan bisnis pribadi dan kepercayaan lembaga keuangan dan kemauan untuk berpartisipasi. Meningkatnya persaingan akan terjadi meningkatkan kualitas dan biaya kinerja kontrak pemerintah, sehingga meminimalisir adanya tindak kecurangan pada pengadaan barang dan meningkatkan kinerja.

Penelitian lainnya berdasarkan jurnal internasional dilakukan oleh Rene G. Rendon dan Juanita M. Rendon tahun 2015 mengenai “Auditability in public procurement: an analysis of internal controls and fraud vulnerability” yang bila diartikan kurang lebih sebagai berikut “Kemampuan audit dalam pengadaan publik: analisis pengendalian internal dan kerentanan kecurangan”, penelitian ini mengembangkan survei berbasis web yang dirancang untuk menilai pengadaan, pengetahuan tenaga kerja tentang pengendalian internal pengadaan dan juga pengadaannya persepsi kontrol internal organisasi. Dan didapatkan hasil bahwa kurangnya evaluasi yang ada dalam organisasi dan departemen Pertahanan untuk memperbaiki pengadaan internal kontrol untuk membantu mengurangi kerentanan terhadap kecurangan pengadaan dan juga memastikannya evaluasi dalam organisasi mereka. Sebagai organisasi pertahanan, juga badan pengadaan publik internasional, terus berusaha untuk akuntabilitas, integritas, dan transparansi dalam operasi pengadaan didalamnya. Dengan penelitian ini dapat membimbing lembaga pengadaan

publik serta mendorong instansi terkait memiliki orang-orang yang kompeten, pengendalian internal yang efektif, dan memahami proses serta evaluasi.

Penelitian lainnya berdasarkan jurnal internasional dilakukan oleh mengenai “Procurement fraud in the US Department of Defense: Implications for contracting processes and internal controls” yang bila diartikan kurang lebih sebagai berikut “Kecurangan pengadaan di Departemen Pertahanan AS: Implikasi untuk proses kontrak dan pengendalian internal”, penelitian ini sesuai dengan pendekatan studi kasus kualitatif dan didapatkan hasil sebagaimana yaitu Makalah ini menganalisis insiden penipuan pengadaan aktual dan mengidentifikasi di mana tahap proses manajemen kontrak terjadi kecurangan dan internal mana komponen kontrol dikaitkan dengan skema kecurangan dimana ditemukan Kecurangan insiden umumnya terjadi selama pemilihan sumber dan kontrak tahap administrasi dan melibatkan kegiatan pengendalian, pemantauan dan pengendalian lingkungan komponen pengendalian internal. Namun penelitian ini terdapat keterbatasan yakni Insiden kecurangan dianalisis dengan menggunakan manajemen kontrak dan kerangka pengendalian internal yang diadopsi oleh Pemerintah AS. Rekomendasi dikembangkan untuk memperbaiki proses kontrak dan pengendalian internal sebagai pendekatan untuk deterring dan detecting penipuan pengadaan dan mungkin berlaku untuk badan pengadaan publik internasional lainnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penekanan pada kemampuan proses kontrak dan pengendalian internal yang efektif harus diadopsi untuk memerangi penipuan pengadaan. Dengan menekankan kemampuan proses dan pengendalian internal yang efektif, pemerintah dapat menerapkan pendekatan strategis untuk mendeteksi dan menghalangi kecurangan dan dengan demikian memastikan bahwa pemerintah uang dihabiskan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Insiden penipuan pengadaan ini mungkin terjadi karena kurangnya kompeten personil, proses kontrak yang kurang mampu atau pengendalian internal yang tidak efektif. Untuk Setiap insiden kecurangan, kami mengidentifikasi fase proses kontrak

di mana insiden penipuan pengadaan terjadi dan komponen pengendalian internal terkait dengan skema penipuan pengadaan.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Pengendalian Internal**

#### **A. Pengertian Pengendalian Internal**

Pengendalian internal mencakup lima komponen dasar kebijakan prosedur yang dirancang manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan tertentu perusahaan dapat dipenuhi. Arens (2010) mengemukakan bahwa :

*“Internal control includes five categories of controls that management design and implements to provide reasonable assurance that management’s control objectives will be met. These are called component of internal control and are” :*

1. *Control Environment* (Lingkungan pengendalian)
2. *Risk Assessment* (Penilaian risiko)
3. *Information and Communication* (Aktivitas pengendalian)
4. *Control Activities* (Informasi dan komunikasi)
5. *Monitoring* (Pemantauan)

Komponen-komponen pengendalian internal tersebut diatas, merupakan proses yang diperlukan untuk mencapai tujuan pengendalian intern. Kelima komponen pengendalian intern tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian terdiri atas tindakan, kebijakan dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak, para direktur dan pemilik entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian internal serta arti pentingnya bagi entitas. Untuk memahami dan menilai lingkungan pengendalian, auditor harus mempertimbangkan subkomponen pengendalian, yaitu :

a. Integritas dan nilai-nilai etis

Integritas dan nilai-nilai etis adalah produk dari standar etika dan perilaku entitas, serta bagaimana standar itu dikomunikasikan dan diberlakukan dalam praktik. Subkomponen ini meliputi tindakan manajemen untuk menghilangkan atau mengurangi dorongan dan godaan yang mungkin membuat karyawan melakukan tindakan penyimpangan. Serta meliputi pengkomunikasian nilai-nilai entitas dan standar perilaku kepada para karyawan meliputi pernyataan kebijakan, kode perilaku dan teladan.

b. Komitmen pada kompetensi

Kompetensi adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas mendefinisikan pekerjaan seseorang. Komitmen terhadap kompetensi meliputi pertimbangan manajemen tentang tingkat kompetensi bagi pekerjaan tertentu dan bagaimana tingkatan tersebut diterjemahkan menjadi keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan.

c. Partisipasi dewan komisaris atau komite audit

Dewan komisaris berperan penting dalam tata kelola korporasi yang efektif karena memikul tanggung jawab akhir untuk memastikan bahwa manajemen telah mengimplementasikan pengendalian internal dan proses laporan keuangan yang layak.

d. Filosofi dan gaya operasi manajemen

Manajemen melalui aktivitasnya memberikan isyarat yang jelas kepada para karyawan tentang pentingnya pengendalian internal. Filosofi dan gaya operasi manajemen menjangkau tentang karakteristik yang luas. Karakteristik tersebut meliputi: pendekatan pimpinan perusahaan dalam mengambil keputusan dan memantau resiko usaha, sikap dan tindakan pimpinan perusahaan untuk mencapai anggaran laba dan sasaran operasi lainnya serta pelaporan keuangan.

e. Struktur organisasi

Struktur organisasional entitas menentukan garis-garis tanggung jawab dan kewenangan yang ada. Dengan memahami struktur organisasi klien, auditor dapat mempelajari pengelolaan dan unsur-unsur fungsional bisnis serta melihat bagaimana pengendalian diimplementasikan.

f. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

Aspek paling penting dari pengendalian internal adalah personil. Jika para karyawan kompeten dan bisa dipercaya, pengendalian lainnya dapat diabaikan dan laporan keuangan yang andal masih akan dihasilkan. Karena pentingnya personil yang kompeten dan terpercaya dalam mengadakan pengendalian yang efektif, metode untuk mengangkat, mengevaluasi, melatih, mempromosikan dan memberikan kompensasi kepada personil itu merupakan bagian yang penting dari pengendalian internal.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko atas pelaporan keuangan adalah tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan GAAP. Penilaian risiko oleh manajemen berbeda tetapi berhubungan erat dengan penilaian risiko oleh auditor. Apabila manajemen menilai risiko sebagai bahan perancangan dan pelaksanaan pengendalian internal untuk meminimalkan kekeliruan serta kecurangan, auditor menilai risiko untuk memutuskan bukti yang dibutuhkan dalam audit. Jika manajemen secara efektif menilai dan merespon risiko itu, biasanya auditor akan mengumpulkan lebih sedikit bukti ketimbang jika manajemen gagal mengidentifikasi atau merespon risiko yang signifikan. Auditor akan memperoleh pengetahuan tentang proses penilaian risiko oleh manajemen dengan memanfaatkan kuesioner dan diskusi dengan manajemen untuk menentukan bagaimana manajemen mengidentifikasi risiko-risiko

yang relevan dengan pelaporan keuangan, mengevaluasi signifikansi dan kemungkinan terjadinya risiko itu, serta memutuskan tindakan apa yang perlu dilakukan untuk menangani risiko itu.

### 3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk menangani risiko guna mencapai tujuan entitas. Aktivitas pengendalian umumnya dibagi menjadi lima jenis berikut ini :

- 1) Pemisahan tugas yang memadai
- 2) Otorisasi yang sesuai atas transaksi dan aktivitas
- 3) Dokumen dan catatan yang memadai
- 4) Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan
- 5) Pemeriksaan kinerja secara independen

### 4. Informasi dan Komunikasi

Tujuan sistem informasi dan komunikasi akuntansi dari entitas adalah untuk memulai, mencatat, memroses dan melaporkan transaksi yang dilakukan oleh entitas itu serta mempertahankan akuntabilitas aktiva terkait. Sistem informasi dan komunikasi akuntansi mempunyai beberapa subkomponen, yang biasanya terdiri atas kelas-kelas transaksi seperti penjualan, retur penjualan, penerimaan kas dan akuisisi. Untuk memahami perancangan sistem informasi akuntansi, auditor menentukan (1) kelas transaksi utama entitas; (2) bagaimana transaksi dimulai dan dicatat; (3) catatan akuntansi apa saja yang ada serta sifatnya; (4) bagaimana sistem itu menangkap peristiwa-peristiwa lain yang penting bagi pelaporan keuangan, seperti penurunan nilai aktiva; dan (5) sifat serta rincian proses pelaporan keuangan yang diikuti, termasuk prosedur pencatatan transaksi dan penyesuaian dalam buku besar umum.

### 5. Pemantauan

Aktivitas pemantauan berhubungan dengan penilaian mutu pengendalian internal secara berkelanjutan atau periodik oleh

manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan dan telah dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi. Selain perannya dalam memantau pengendalian internal entitas, staf audit internal yang memadai juga dapat mengurangi biaya audit eksternal dengan memberikan bantuan langsung kepada audit eksternal.

Komponen pengendalian internal antara satu dengan lainnya saling berhubungan dan timbul dari proses manajemen. Pengendalian internal bukanlah suatu kejadian tunggal, tetapi merupakan serangkaian tindakan dan kegiatan yang meliputi operasi organisasi. Tindakan-tindakan ini melekat dalam metode yang digunakan manajemen untuk melaksanakan operasi sehari-hari. Apabila salah satu komponen tidak dilaksanakan dengan memadai, maka seluruh pengendalian intern tidak akan berjalan efektif (Ruslan,2009).

Ikatan Akuntan Indonesia (2009:319.2) mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan gambaran keyakinan memadai tentang pencapaian keandalan laporan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Mulyadi (2008:163) berpendapat bahwa sistem pengendalian internal adalah sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Hery (2014:90), berpendapat bahwa pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum atau undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.

*The committee of sponsoring organizations (COSO)* yang dikutip dalam YPIA (2008:17) merumuskan pengendalian internal sebagai sebuah proses, yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, direksi, manajemen, dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberi jaminan yang wajar atas tercapainya tujuan organisasi. Tujuan yang dimaksud, secara umum meliputi, operasi yang efisien dan efektif, pelaporan yang handal, dan ketaatan pelaksanaan kegiatan organisasi terhadap semua kebijakan dan regulasi yang berlaku.

YPIA (2008:3) mengartikan arti pengendalian internal adalah segala hal untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai. Pengendalian internal dapat berupa kebijakan, prosedur, alat-alat, dan tindakan untuk memastikan bahwa hal yang kita inginkan terjadi akan terjadi dan hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi.

Dari pengertian yang telah dikemukakan sebelumnya, dijelaskan bahwa pengendalian internal merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris yang ditunjukkan untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan pengendalian operasional yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Pengendalian internal yang terdapat dalam perusahaan tidak hanya mencakup kegiatan akuntansi dan keuangan saja tetapi meliputi segala aspek kegiatan perusahaan. Pengendalian internal dapat digunakan untuk:

- a. Menjaga keamanan harta milik perusahaan,
- b. Memberikan keyakinan bahwa laporan laporan yang disampaikan kepada pimpinan adalah benar,
- c. Meningkatkan efisiensi usaha, dan
- d. Memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan telah dijalankan dengan baik.

Selanjutnya pengertian pengendalian internal mengalami perluasan, AICPA memperkenalkan perbedaan antara *accounting control* dan *administrative control*. Kemudian dilakukan perubahan nama menjadi *internal control system*.

Dengan *internal control system* ini, bukan hanya dihasilkan pengendalian akuntansi tetapi juga pengendalian administrasi, yang dikembangkan melalui penetapan struktur organisasi, uraian tugas, pemberian wewenang, prosedur, seleksi sumber daya manusia, situasi kerja yang sehat, dan pengawasan langsung.

### **B. Tujuan Pengendalian Internal**

Mulyadi (2008:181) menjelaskan tujuan pengendalian intern adalah sebagai berikut :

1. Keandalan Informasi Keuangan,
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku,
3. Efektivitas dan efisiensi operasi.

Pendapat lain dikemukakan oleh Walter T Horrison Jr. *et al.* (2012:233) menjelaskan pengendalian internal merupakan rencana organisasi dan sistem prosedur yang di implementasikan oleh manajemen perusahaan dan dewan direksi untuk memenuhi lima tujuan berikut :

- a. Menjaga Asset  
Dimana setiap perusahaan haruslah menjaga asetnya dari pemborosan, inefisiensi, dan kecurangan.
- b. Mendorong Karyawan untuk mengikuti kebijakan perusahaan  
Semua yang berada dalam sebuah organisasi atau perusahaan, manajer, dan karyawan harus bekerja mencapai tujuan yang sama.
- c. Mempromosikan Efisiensi Operasional  
Sebuah perusahaan tidak boleh memboroskan sumber daya yang mereka miliki. Perusahaan bekerja keras untuk melakukan penjualan dan tidak ingin menyalakan setiap manfaat yang ada.
- d. Memastikan catatan akuntansi yang akurat dan dapat diandalkan  
Catatan yang akurat merupakan hal yang penting. Tanpa pengendalian yang memadai, catatan mungkin tidak dapat diandalkan, yang

membuatnya tidak mungkin menyatakan bagaimana dari perusahaan yang menguntungkan dan dari mana yang memerlukan perbaikan. Perusahaan dapat kehilangan uang atas setiap produk yang terjual kecuali catatan yang akurat mengenai biaya produk tersebut telah dibuat.

e. Menaati persyaratan hukum

Pengendalian internal yang efektif akan membantu memastikan ketaatan terhadap hukum dan membantu menghindari kesulitan hukum.

### C. Fungsi Pengendalian Internal

Romney dan Steinbart (2009:222) menjelaskan bahwa, Pengendalian internal pastinya memiliki struktur. Struktur pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan tingkat jaminan yang wajar atas pencapaian tujuan tertentu organisasi. Pengendalian internal melaksanakan tiga fungsi penting yaitu :

- a. Pengendalian untuk pencegahan (*preventive control*) : Mencegah timbulnya suatu masalah sebelum mereka muncul. Seperti mempekerjakan anggota akuntansi yang berkualifikasi tinggi, pemisahan tugas pegawai yang memadai, dan secara efektif mengendalikan akses fisik atas asset, fasilitas dan informasi, merupakan salah contoh pengendalian yang efektif.
- b. Pengendalian internal untuk pemeriksaan (*detective control*) pemeriksaan dibutuhkan untuk mengungkap masalah begitu masalah tersebut muncul.
- c. Pengendalian korektif (*corrective control*) :Yaitu memecahkan masalah yang ditemukan oleh pengendalian untuk pemeriksaan. Pengendalian ini mencakup prosedur yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi penyebab masalah, memperbaiki kesalahan atau kesulitan yang ditimbulkan, dan mengubah sistem agar masalah di masa mendatang dapat diminimalisasikan atau dihilangkan.

#### **D. Unsur-Unsur Pengendalian Internal**

Mulyadi (2010:164) berpendapat bahwa unsur-unsur yang mendukung atau menunjang terlaksananya sistem pengendalian intern yang baik adalah sebagai berikut :

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas.

Struktur organisasi merupakan kerangka (*Framework*) pembagian tanggungjawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggungjawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi.
- b. Suatu fungsi tidak boleh diberitanggungjawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.

Pemisahan fungsi akuntansi dari fungsi-fungsi operasi dan fungsi penyimpanan, catatan akuntansi yang diselenggarakan dapat mencerminkan transaksi sesungguhnya yang dilaksanakan oleh unit organisasi yang memegang fungsi operasi dan fungsi penyimpanan. Dengan demikian dalam pelaksanaan suatu transaksi dapat terdapat internal *check* di antara unit organisasi pelaksana.

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. Setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dan pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut oleh karena itu, dalam organisasi hanya dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi dalam organisasi. Salah satu media yang digunakan untuk merekam penggunaan wewenang untuk memberikan otorisasi

terlaksananya transaksi dalam organisasi adalah formulir, oleh karenanya penggunaan formulir dicatat dalam catatan akuntansi dengan tingkat ketelitian dan keandalannya (*reliability*) yang tinggi. Dengan demikian sistem otorisasi akan menjamin dihasilkannya dokumen pembukuan yang dapat dipercaya, sehingga akan menjadi masukan yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi. Selanjutnya, prosedur pencatatan yang baik akan menghasilkan informasi yang diteliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan dan biaya suatu organisasi.

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Pembagian tanggungjawab dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah :
  - a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang berwenang.
  - b. Pemeriksaan mendadak (*surprised audit*).
  - c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi lain.
  - d. Perputaran jabatan (*job rotation*).
  - e. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak.
  - f. Secara periodik diadakan pencatatan fisik kekayaan dengan catatannya.
  - g. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian intern yang lain.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya. Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk

mendorong praktik yang sehat, semuanya sangat bergantung kepada manusia yang melaksanakannya. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan. Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, berbagai cara berikut ini dapat ditempuh:

- a. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya.
- b. Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya.

Menurut AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*) dalam SAS (*Statement on Auditing Standards*) No. 78 yang terdapat dalam Standar Profesi Akuntan Publik menyatakan komponen pengendalian intern terdiri dari :

- a. Lingkungan Pengendalian
- b. Penilaian Resiko
- c. Informasi dan komunikasi
- d. Pengawasan
- e. Aktivitas Pengendalian

### **E. Prinsip-Prinsip Pengendalian Internal**

Hery (2014:14) berpendapat bahwa, untuk mengamankan aset dan meningkatkan keakuratan serta keandalan catatan informasi akuntansi, biasanya perusahaan menerapkan lima prinsip pengendalian internal tertentu, yaitu :

#### **1. Penetapan Tanggung Jawab**

Penetapan tanggung jawab secara spesifik merupakan karakteristik utama dari pengendalian internal. Penetapan tanggung jawab diberikan agar masing-masing karyawan secara spesifik yang telah dipercayakan kepadanya. Pengendalian atas pekerjaan tertentu akan menjadi lebih

efektif jika hanya ada satu orang saja yang bertanggung jawab atas tugas atau pekerjaan tersebut. Penetapan tanggung jawab tentu saja meliputi pemberian otorisasi untuk menyetujui (approve) atas suatu transaksi.

## 2. Pemisahan Tugas

Pemisahan tugas disini adalah pemisahan fungsi atau pembagian kerja. Ada dua bentuk umum dari penerapan prinsip pemisahan tugas ini, yaitu, Pekerjaan yang berbeda seharusnya dikerjakan oleh karyawan yang berbeda pula. Harusnya ada pemisahan tugas antara karyawan yang menangani pekerjaan pencatatan aset dan karyawan yang menangani langsung aset secara fisik (operasional).

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi memberikan bukti bahwa transaksi bisnis atau peristiwa ekonomi telah terjadi, dengan membutuhkan atau memberikan tanda tangan ke dalam dokumen, orang yang bertanggung jawab atas suatu transaksinya atau peristiwa yang dapat diidentifikasi dengan mudah, dibuat ketika transaksi terjadi dengan bernomor urut tercetak, yang langsung dapat dipertanggung jawabkan.

## 4. Pengendalian Fisik, Mekanik, dan Elektronik

Pengendalian fisik terutama terkait dengan pemangaman aset. Pengendalian mekanik dan elektronik juga mengamankan aset. Pengecekan Independen atau Verifikasi Internal. Prinsip ini meliputi peninjauan ulang, perbandingan, dan pencocokan data yang telah disiapkan oleh karyawan yang berbeda. Untuk memperoleh manfaat maksimum dari pengecekan independen atau verifikasi internal maka :

- a. Verifikasi seharusnya dilakukan secara periodik/berkala atau dilakukan atas dasar dadakan.
- b. Verifikasi sebaiknya dilakukan oleh orang yang independen. Ketidaccocokan/ketidaksesuaian dan pengecualian seharusnya dilaporkan ke tingkat manajemen yang memang dapat mengambil tindakan korektif secara cepat.

## F. Kunci Keberhasilan (atau sebaliknya) Pengendalian Internal

Membangun pengendalian internal yang kuat bukan hal yang mudah, tetapi belum tentu sulit. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai kunci keberhasilan (atau sebaliknya) adalah :

1. Komitmen *Business Owner/BOD* untuk menjadikan pengendalian internal sebagai bagian dari budaya organisasi (tertuang dalam Visi, Misi, *shared values* perusahaan) serta terpancar melalui keteladanan sikap yang menjunjung tinggi *responsibility*, *accountability*, dan *transparency* (*Good Corporate Governance*) serta kepatuhan terhadap hukum dan etika bisnis yang berlaku.
2. Keberanian Perusahaan untuk melengkapi bisnis dengan infrastruktur pengendalian yang mumpuni melalui :
  - a. Penempatan SDM yang berintegras dan berkompetensi tinggi pada sejumlah “posisi kunci pengendalian internal”
  - b. Penempatan unit kerja Internal Audit dan perangkat pengendalian independen lainnya (seperti *risk management* dan *system development*) pada posisi yang strategis (*decision authority* yang memadai), atau setidaknya *Head of Department* yang bersangkutan sejajar dengan tingkatan *Head Of Department* unit-unit kerja di *Execustion level*.
  - c. Investasi yang cukup dalam pengembangan computer-based information system untuk memudahkan risk assessment dan monitoring.
3. Dorongan secara *Top-Down* yang teratur dan konsisten terhadap seluruh jajaran internal yang bertujuan memperkuat genuine environmental control byself dengan cara :
  - a. Mengkomunikasikan setiap hal yang perlu diketahui oleh semua level, baik *level Strategic* maupun *Executive* (*business plan/target, policy, progress & critical issues*, dan sebagainya)
  - b. Mengoptimalkan birokrasi yang ramping (*lean bureaucracy*) pendelegasian otoritas yang memadai pada seluruh unit kerja, dan koordinasi antarbagian yang solid.

- c. Membangun tingkat kepatuhan pada kaidah bisnis/prosedur kerja dan mendorong pencapaian aktualisasi maksimum setiap individu melalui sebuah *career development* serta *reward & punishment system* berdasarkan azas keadilan. ([www.google.com](http://www.google.com)).

### **G. Ciri-Ciri Pengendalian Internal Yang Efektif**

Akmal (2007:25) menyatakan bahwa, ciri-ciri pengendalian internal yang efektif adalah :

1. Tujuannya Jelas  
Jika suatu pengendalian tidak dapat dimengerti, maka prosedur pengendalian tersebut tidak akan digunakan dan jika tidak memiliki tujuan yang jelas pengendalian tersebut tidak memiliki nilai.
2. Dibangun untuk tanggung jawab bersama  
Suatu pengendalian internal harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh pengguna atau seluruh pihak yang berkaitan.
3. Biaya yang dikeluarkan dapat mencapai tujuan  
Biaya yang dikeluarkan harus mencapai tujuan yang ditetapkan, namun biaya tersebut tidak boleh melebihi dari manfaat yang dihasilkannya.
4. Didokumentasikan  
Proses dokumentasi yang baik adalah proses dokumentasi yang sederhana dan dapat dengan mudah dimengerti. Serta jelas hubungannya dengan resiko pengendalian dan memberikan keyakinan kepada manajemen bahwa pengendalian internal ini berada pada tempatnya.
5. Dapat diuji dan di review  
Proses pengendalian dan manajemen dan dokumentasinya dapat diuji dan di review agar dapat disempurnakan atau dapat diperbaharui jika proses pengendalian internal yang dilakukan sudah tidak sesuai dengan kondisi pada saat pengendalian dilakukan.

### 2.2.2. Teori *Fraud*

#### A. Pengertian *Fraud*

Umumnya dikenal dua tipe kesalahan, yaitu kekeliruan (*errors*) dan keridakberesan (*irregularities*), *Errors* merupakan kesalahan yang timbul sebagai akibat tindakan yang tidak sengaja yang dilakukan manajemen atau karyawan, perusahaan yang mengakibatkan kesalahan teknis perhitungan, pemindahbukuan dan lain-lain. Sedangkan *irregularities* merupakan kesalahan yang disengaja yang dilakukan oleh manajemen atau karyawan perusahaan yang mengakibatkan kesalahan material terhadap penyajian laporan keuangan, misalnya kecurangan (*fraud*).([google.com](http://google.com)).

James (2011), *fraud* (kecurangan) merupakan kesalahan penyajian dari fakta material yang dibuat oleh salah satu pihak ke pihak yang lain dengan niatan untuk menipu dan menyebabkan pihak lain yang mengandalkan fakta tersebut mengalami kerugian. Secara umum aktivitas *fraud* (kecurangan) mencakup lima kondisi berikut :

1. Penyajian yang keliru (*false representation*), pasti ada penyajian yang keliru atau kurang lengkap dalam pengungkapan.
2. Fakta material (*material fact*), fakta merupakan hal yang substansial yang mendorong seseorang untuk berbuat
3. Niat (*intent*), selalu ada niat untuk mengarahkan ke hal yang keliru (*deceive*)
4. Pengkhianatan kepercayaan (*justifiable reliance*), penyajian yang salah terhadap faktor substansial yang diandalkan oleh pihak yang dirugikan
5. Kerugian (*injury or loss*), penipuan yang telah dilakukan mengakibatkan kerugian pada korban

Tuanakotta (2010) menyatakan kecurangan sebagai tindakan sengaja untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang semestinya sehingga perusahaan menerbitkan laporan keuangan yang dapat menyesatkan pemakai secara material. Kecurangan dapat dikelompokkan dalam tiga bentuk yaitu penyelewengan aset

(*asset misappropriation*), kecurangan akuntansi atau kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*), dan korupsi (*corruption*).

Definisi *fraud* menurut Karyono (2013:4-5) adalah kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Kecurangan di rancang untuk memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain.

Beberapa definisi *fraud* dapat penulis simpulkan bahwa *fraud* ialah tindakan yang dilakukan oleh seorang individu atau organisasi secara sengaja untuk menipu, menyembunyikan, atau mendapatkan keuntungan dalam suatu kondisi, dimana tindakan tersebut dapat merugikan pihak-pihak terkait.

## **B. Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya *Fraud***

William C Boyton dalam (Alvin A. Arens 2008:432) mengemukakan tiga kondisi kecurangan yang berasal dari pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aktiva diuraikan dalam SAS 99 (AU 316). *Fraud Triangle* (segitiga *fraud*) ada 3 hal diuraikan dalam SAS 99 (AU 316). *Fraud triangle* (Segitiga *Fraud*) ada 3 hal yang mendorong terjadinya sebuah upaya *fraud*, yaitu *pressure* (dorongan), *Opportunity* (Peluang) ada 3 hal yang mendorong terjadinya sebuah upaya *fraud*, yaitu *Pressure* (Dorongan), *Opportunity* (Peluang) dan *rationalization* (rasionalisasi).

1. *Pressure* adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan *fraud*, contohnya hutang atau tagihan yang menumpuk, gaya hidup mewah, ketergantungan narkoba, dll. Pada umumnya yang mendorong terjadinya *fraud* adalah kebutuhan atau masalah finansial. Tapi banyak juga yang hanya terdorong karna keserakahan.

2. *Opportunity* adalah peluang yang memungkinkan fraud terjadi. Biasanya disebabkan karena internal control suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan dan/atau penyalahgunaan wewenang, diantara 3 elemen fraud triangle, opportunity merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk meminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan control dan upaya deteksi dini terhadap fraud.
3. *Rationalization* menjadi elemen penting dalam terjadinya fraud, dimana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya, misalnya :
  - a. Bahwasanya tindakannya untuk membahagiakan keluarganya orang-orang yang dicintainya.
  - b. Masa kerja pelaku cukup lama dan dia merasa seharusnya berhak mendapatkan lebih dari yang telah dia dapatkan sekarang (Posisi, gaji, promosi, dll).
  - c. Perusahaan telah mendapatkan banyak keuntungan yang sangat besar dan tidak mengapa jika pelaku mengambil bagian kecil dari keuntungan tersebut.

### **C. Jenis-Jenis *Fraud* dan Konsep Pencegahan *Fraud***

Menurut Tuanakotta (2007:159) ada ungkapan yang secara mudah ingin menjelaskan penyebab atau akar permasalahan dari *fraud*. Ungkapan itu adalah: *fraud by need, by greed and by opportunity*. Ungkapan tersebut diartikan jika kita ingin mencegah *fraud*, hilangkan atau tekan sekecil mungkin penyebabnya. Banyak organisasi tidak memiliki upaya untuk menghadapi *fraud* dengan pendekatan proaktif. Ketika *fraud* terjadi dalam suatu organisasi harus menghadapi suatu dilema. Apabila terjadi dugaan *fraud*, umumnya banyak organisasi menyelesaikannya secara internal tanpa mau dipublikasikan. Selanjutnya kasus ditutup dan masalahnya dianggap selesai.

*Fraud* menunjuk pada penyajian fakta yang bersifat material secara salah yang dilakukan oleh satu pihak ke pihak lain dengan tujuan untuk membohongi dan mempengaruhi pihak lain untuk bergantung pada fakta tersebut, fakta yang

akan merugikannya dan berdasarkan hukum yang berlaku, suatu tindakan yang curang (*fraudulent act*) harus memenuhi lima kondisi ini:

1. Penyajian yang salah.  
Harus terdapat laporan yang salah atau tidak diungkapkan;
2. Fakta yang sifatnya material.  
Suatu fakta harus merupakan faktor yang substansial yang mendorong seseorang untuk bertindak;
3. Tujuan.  
Harus terdapat tujuan untuk menipu atau pengetahuan bahwa laporan tersebut salah;
4. Ketergantungan yang dapat dijustifikasi.  
Penyajian yang salah harus merupakan faktor yang substansial yang menyebabkan pihak lain merugi karena ketergantungannya;
5. Perbuatan tidak adil atau kerugian.  
Kebohongan tersebut telah menyebabkan ketidakadilan atau kerugian bagi korban *fraud*.

*Fraud* terjadi pada dua tingkatan, yaitu *fraud* pegawai dan *fraud* manajemen, sangat penting untuk membedakan antara kedua jenis *fraud* ini karena tiap jenis memiliki tanggung jawab dan implikasi yang berbeda bagi auditor. Pertama, *Fraud* pegawai atau *fraud* oleh pegawai non-manajemen, biasanya ditujukan untuk langsung mengkonversi kas atau aktiva lainnya untuk keuntungan pegawai tersebut. Pada umumnya, pegawai tersebut mengakali perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Jika suatu perusahaan memiliki sistem pengendalian internal yang efektif, kebangkrutan atau penggelapan uang dapat dideteksi atau dihindari. *Fraud* pegawai biasanya melibatkan tiga langkah:

1. Mencuri sesuatu yang berharga (sebuah aktiva),
2. Mengkonversi aktiva tersebut ke bentuk yang dapat digunakan (kas),
3. Menutupi kejahatannya agar tidak diketahui.

Langkah ketiga sering kali merupakan hal yang paling sulit. Langkah ini mungkin relatif mudah bagi petugas administrasi gudang untuk mencuri persediaan dari gudang perusahaan, tetapi mengubah catatan persediaan lebih menantang.

Kedua, *Fraud* manajemen lebih tersembunyi dan membahayakan daripada *fraud* pegawai dan seringkali lolos dari deteksi sampai organisasi tersebut menderita kerugian atau kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. *Fraud* manajemen biasanya terdiri atas tiga karakter ini:

1. *Fraud* ini dilakukan pada tingkat manajemen di atas tingkat manajemen di mana struktur kontrol internal biasanya berkaitan;
2. *Fraud* ini biasanya melibatkan penggunaan laporan keuangan untuk menciptakan ilusi bahwa entitas lebih sehat dan lebih makmur dari kenyataannya;
3. Jika *fraud* tersebut melibatkan pernyataan aktiva secara salah, ia biasanya dikelilingi oleh transaksi bisnis yang kompleks, yang sering kali melibatkan pihak ketiga.

Karakteristik sebelumnya dari *fraud* manajemen menunjukkan bahwa pihak manajemen sering kali melakukan hal yang melanggar peraturan dengan mengesampingkan sistem pengendalian internal yang efektif. Ketika pihak manajemen menggunakan laporan keuangan tersebut untuk menciptakan ilusi, data yang diinput biasanya dimanipulasi dengan memasukkan transaksi yang salah atau dapat dipertanyakan atau penilaian yang dapat dipertanyakan berkaitan dengan alokasi biaya atau pengakuan pendapatan. *Fraud* terdiri dari tiga jenis penyimpangan, *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) dalam Jatiningsy (2011) membagi *fraud* dalam tiga jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan, yaitu Penyimpangan atas Aset (*Asset Misappropriation*), Pernyataan Palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*) dan Korupsi (*Corruption*). (www.google.com).

Memahami jenis-jenis fraud maka akan dilakukan teknik dan metode pencegahannya. Tujuan utama pencegahan *fraud* adalah untuk menghilangkan sebab-sebab munculnya *fraud*. *Fraud* sering terjadi apabila:

1. Pengendalian internal tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar atau tidak efektif;
2. Pegawai diperkerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka;
3. Pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau di-tempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan;
4. Model manajemen melakukan fraud, tidak efisien dan atau tidak efektif serta tidak taat pada hukum dan peraturan yang berlaku;
5. Pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang harus dipecahkan, masalah keuangan, masalah kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan;
6. Industri di mana perusahaan menjadi bagiannya memiliki sejarah atau tradisi terjadinya fraud.

Pencegahan kecurangan adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem, dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tiga tujuan pokok, yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Kecurangan yang mungkin terjadi harus dicegah antara lain dengan cara-cara berikut :

1. Membangun struktur pengendalian intern yang baik
2. Mengefektifkan aktivitas pengendalian
3. Meningkatkan kultur organisasi
4. Mengefektifkan fungsi internal audit

Wind (2014) menyatakan secara garis besar siklus pencegahan *fraud* memiliki empat unsur utama, antara lain :

1. Pembentukan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*), dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya *fraud*. *Corporate governace* meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian wewenang.
2. Pelaksanaan Proses Kontrol Transaksi Keuangan (*Transaction LevelControl Process*) yang dilakukan oleh auditor internal, pada dasarnya adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang memadai yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian.
3. Pemeriksaan Retrospektif (*Retrospektive Examination*), yang dilakukan oleh Auditor Eksternal diarahkan untuk mendeteksi *fraud* sebelumnya menjadi besar dan membahayakan perusahaan.
4. Investigasi dan Remediasi atas kejadian (kasus) yang dicurigai atau diduga bermasalah (*investigation and remediation*), yang dilakukan forensik auditor. Peran *auditor forensic* adalah tingkat kefatalan *fraud*, tanpa memandang apakah *fraud* itu hanya berupa pelanggaran kecil terhadap kebijakan perusahaan ataukah pelanggaran besar yang berbentuk *fraud* dalam laporan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan asset.

#### **D. Tanda-Tanda Terjadinya *Fraud***

*Fraud* dapat ditangani sedini mungkin oleh manajemen atau pemeriksaan Intern apabila jeli dalam melihat tanda-tanda *fraud* tersebut. Beberapa tanda-tanda *fraud* di antaranya adalah :

1. Terdapat perbedaan angka laporan keuangan yang mencolok dengan tahun-tahun berikutnya.
2. Tidak ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas
3. Tidak ada rotasi pekerjaan karyawan
4. Pengendalian operasi yang tidak baik
5. Situasi karyawan yang sedang dalam tekanan

#### **E. Kendala Pendeteksian *Fraud***

Ir. Valery G Kumaat (2011:133) menyatakan bahwa kendala pendeteksian *fraud* yaitu meliputi :

1. Sulit menelusuri/mengumpulkan bukti (karena terjadi upaya penghilangan „jejak“)
2. Tidak jarang kecurangan dilakukan secara “berjamah”
3. Jarang ada yang mau menjadi saksi yang memberatkan (karena menghindari konsekuensi rusaknya relasi pertemanan, bahkan lebih jauh risiko timbulnya ancaman atau dendam pribadi).
4. Pelaku berupaya menyangkal dan „membelokkan“ masalah kesituasi lain (hanya kesalahan administratif, nilai kerugian yang tidak signifikan, hanya sebagai “korban fitnah” dan sebagainya).

### **2.2.3. Pengadaan Barang dan Jasa**

#### **A. Pengertian Pengadaan Barang**

Pengadaan barang dan jasa banyak dilakukan oleh instansi pemerintah maupun sektor swasta. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa oleh suatu instansi/lembaga yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa tersebut. Berikut adalah beberapa definisi mengenai pengadaan barang dan jasa :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Yahya dkk, 2012) Pengadaan barang dan jasa berarti tawaran untuk mengajukan harga dan memborong pekerjaan atas penyedia barang/jasa.

Christopher & Schooner (2007) berpendapat bahwa pengadaan atau procurement adalah kegiatan untuk mendapatkan barang secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya.

Peraturan Presiden Indonesia No 70 Tahun 2012 :Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang / Jasa oleh Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan mengenai definisi pengadaan barang dan jasa adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan oleh perusahaan dilihat dari kebutuhan dan penggunaannya, serta dilihat dari kualitas, kuantitas, waktu pengiriman dan harga terjangkau, dan pengadaan dapat mempengaruhi keseluruhan proses arus barang karena merupakan bagian penting dalam proses tersebut.

## **B. Langkah-Langkah Pengadaan Barang**

(Bodnar dan Hopwood, 2009: 417) mengemukakan mengenai langkah-langkah umum dalam proses pengadaan barang, adalah sebagai berikut :

### **1. Penentuan Persyaratan**

Pada tahap ini perusahaan membuat permohonan pembelian dengan menyertakan persyaratan spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan.

### **2. Pemilihan Sumber**

Langkah berikutnya adalah menentukan sumber penyedia atau pemasok.

### 3. Permintaan Penawaran

Permintaan untuk penawaran dibuat untuk item atau jasa yang sangat mahal atau jasa yang penawarannya diperlukan sebagai kebijakan perusahaan.

### 4. Pemilihan Pemasok

Berdasarkan dokumen penawaran, maka perusahaan dengan menggunakan seorang ahli yang mengerti mengenai barang atau jasa yang diminta bisa mengevaluasi dan memberikan penilaian terhadap pemasok.

### 5. Membuat Pesanan Pembelian

Dokumen pesanan pembelian mengidentifikasi pemasok dan mengkonfirmasi barang yang dipesan, jumlah, harga, tanggal pengiriman, jangka waktu pengiriman, dan jangka waktu pembayaran.

### 6. Penerimaan Barang

Penerimaan barang dilakukan oleh fungsi penerimaan.

### 7. Verifikasi Faktur

Faktur yang diterima harus diperiksa dan dicocokkan dengan dokumen penerimaan barang dan pesanan pembelian.

### 8. Pembayaran Kepada Pemasok

Jika barang yang diterima sudah sesuai dengan pesanan, maka proses selanjutnya adalah pembayaran kepada pemasok. ([www.google.com](http://www.google.com)).

Secara garis besar proses pengadaan barang adalah sebagai berikut:

1. Prosedur permintaan pembelian
2. Prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok
3. Proses Order Pembelian
4. Prosedur penerimaan barang
5. Prosedur pencatatan utang
6. Prosedur distribusi pembelian

### **C. Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang**

Budiharjo Hardjowijono dan Hayie Muhammad (2008), pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktekan secara efisiensi, efektifitas, persaingan sehat, keterbukaan, transparansi, tidak diskriminasi dan akuntabilitas.

#### 1. Efisiensi

Prinsip Efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa adalah dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dapat diperoleh barang dan jasa dalam jumlah, kualitas yang diharapkan, dan diperoleh dalam waktu yang optimal.

#### 2. Efektivitas

Prinsip efektif dalam pengadaan barang dan jasa adalah sumber daya yang tersedia diperoleh barang dan jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya.

#### 3. Persaingan Sehat

Prinsip persaingan yang sehat dalam pengadaan barang dan jasa adalah adanya persaingan antar calon penyedia barang dan jasa berdasarkan Erika dan norma pengadaan yang berlaku, tidak terjadi kecurangan dan praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

#### 4. Terbuka

Prinsip terbuka dalam pengadaan barang dan jasa adalah memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang dan jasa yang kompeten untuk mengikuti pengadaan

#### 5. Transparansi

Prinsip transparansi dalam pengadaan barang dan jasa adalah pemberian informasi yang lengkap tentang aturan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada semua calon penyedia barang dan jasa yang berminat dan masyarakat.

#### 6. Tidak Diskriminatif

Prinsip tidak diskriminatif dalam pengadaan barang dan jasa adalah pemberian perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia barang dan jasa yang berminat mengikuti pengadaan barang dan jasa

#### 7. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa adalah pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **D. Metode Pengadaan Barang dan Jasa**

Setiap perusahaan menggunakan metode yang berbeda dalam memperoleh produk dan jasa yang tergantung apa dan dimana mereka membeli, kuantitas yang diperlukan, berapa jumlah uang yang terpakai dan sebagainya. Metode procurement antara lain yaitu :

1. Membeli dari manufaktur, penjual grosir atau pengecer dari katalog-katalog mereka dengan adanya negosiasi.
2. Membeli melalui katalog yang terhubung dengan memeriksa katalog penjual atau membeli melalui mal-mal industry.
3. Membeli melalui katalog pembeli internal dimana perusahaan menyetujui katalog-katalog vendor termasuk kesepakatan harga.
4. Mengadakan penawaran tender dari sistem dimana pemasok bersaing dengan yang lainnya. Metode ini digunakan untuk pembelian dalam jumlah besar.
5. Membeli dari situs pelanggan dimana organisasi berpartisipasi sebagai salah satu pembeli.
6. Bergabung dengan suatu kelompok sistem pembeli dimana memeriksa permintaan partisipasi, menciptakan jumlah besar, kemudian kelompok ini dapat menegosiasikan harga.

7. Berkolaborasi dengan pemasok untuk berbagi informasi tentang penjualan dan persediaan, sehingga dapat mengurangi persediaan, stock out dan mempertinggi ketepatan pengiriman. ([www.google.com](http://www.google.com)).

### **E. Tugas dan Tanggung Jawab Pengadaan Barang dan Jasa**

Menurut Moch. Mizanul achlaq (2011) tugas dari bagian pengadaan barang adalah menyediakan barang maupun jasa dengan harga yang murah, berkualitas dan terkirim tepat waktu. Tugas-tugas bagian pengadaan barang tidak terbatas hanya pada kegiatan rutin pembelian. Tugas-tugas bagian pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut :

1. Merancang hubungan yang tepat dengan supplier  
Hubungan dengan supplier bisa bersifat kemitraan jangka panjang maupun hubungan transaksional jangka pendek
2. Memilih *Supplier*
  - a. Kegiatan memilih supplier bisa memakan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit.
  - b. Kesulitan akan lebih tinggi kalau supplier yang akan dipilih berada di mancanegara.
  - c. *Supplier* yang berpotensi untuk menjalin hubungan jangka panjang, proses pemilihan ini bisa melibatkan evaluasi awal, mengundang mereka untuk presentasi, kunjungan lapangan dan sebagainya.
  - d. Pemilihan supplier harus sejalan dengan strategi supply chain.
3. Memilih dan mengimplementasikan teknologi yang cocok
  - a. Kegiatan pengadaan selalu membutuhkan bantuan teknologi.
  - b. Teknologi yang lebih tradisional dan lumrah adalah telepon dan fax.
  - c. Saat ini banyak pula perusahaan yang menggunakan *electronic procurement (e procurement)* yaitu aplikasi internet untuk kegiatan pengadaan.
4. Memelihara data item yang dibutuhkan dan data *supplier*

- a. Bagian pengadaan harus memiliki data yang lengkap tentang item-item yang dibutuhkan meupun data tentang *supplier* mereka.
  - b. Beberapa data *supplier* yang penting untuk dimiliki adalah nama, alamat masing-masing dari *supplier*, item apa yang mereka pasok, harga perunit, pengiriman, kinerja masa lalu, serta kualifikasi *supplier* termmasuk juga kualifikasi ISO.
5. Melakukan proses pembelian
    - a. Proses pembelian biasanya bisa dilakukan dengan beberapa cara, misalnya pembelian rutin dan pembelian dengan melalui tender atau lelang.
    - b. Pembelian rutin dan pembelian dengan tender atau lelang melewati proses-proses yang berbeda.
  6. Mengeluasi kinerja *supplier*. Hasil penilaian ini digunakan sebagai masukan bagi *supplier* untuk meningkatkan kinerja mereka. Kinerja yang digunakan untuk menilai *supplier* seharusnya mencerminkan strategi supply chain dan jjenis barang yang dibeli.

#### **2.2.4. Kerangka Pemikiran**

##### **A. Kerangka Pemikiran**

###### **1. Pengertian Kerangka Pemikiran**

Menurut Husaini Usman dan Purnomo (2012:15), pengertian kerangka pemikiran adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka pemikiran ini merupakan suatu argumentasi kita dalam merumuskan hipotesisdalam merumuskan suatu hipotesis, argumentasi kerangka pemikiran menggunakan logika deduktif (untuk metode kuantitatif) dengan memakai pengetahuan ilmiah sebagai premis-premis dasarnya.

##### **B. Hubungan antar Variabel Penelitian**

Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang. Struktur pengendalian intern sangat penting bagi perusahaan yang

menjalankan seluruh kegiatan usahanya, karena struktur pengendalian intern akan mengamankan sumber-sumber dari pemborosan, kecurangan dan ketidakefisienan, meningkatkan ketelitian dan dapat dipercayainya data akuntansi, mendorong ditaati dan dilaksanakannya kebijakan perusahaan serta meningkatkan efisiensi. Oleh karena itu diperlukan evaluasi mengenai sistem pengendalian intern terhadap penjualan untuk tetap mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan serta tercapainya tujuan perusahaandan mencegah terjadinya *fraud* di perusahaan. Penelitian oleh Hermiyetti (2011) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pada penerapan lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan baik secara parsial maupun simultan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang. Salah hal yang mungkin dapat meminimalisir *fraud* (kecurangan) tersebut salah satunya adalah komitmen organisasi. Suatu komitmen yang kecil atau tidak dihargai sering menjadi lebih buruk dari pada tidak memiliki komitmen sama sekali. Konsistensi karyawan terhadap pekerjaan merupakan suatu hal yang sangat penting karena konsistensi dapat menimbulkan komitmen. Kepercayaan yang cukup beralasan yang berdasarkan pada kejujuran dan perilaku yang konsisten sepanjang waktu, yang mempertinggi reputasi seseorang secara besar-besaran atas komitmen yang konsisten.

Penelitian oleh Cut Meulila (2016) tentang Pengaruh Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Pada PT. Telkomsel Cabang Medan, Program Studi Akuntansi, Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengadaan barang. Komitmen Organisasi memiliki pengaruh yang positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengadaan barang.

### 2.3. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan uraian teori dan keterkaitan antara variabel, berikut ini adalah susunan kerangka penelitian :

**Gambar 2.1**

